

Gerakan Ekumenis di Indonesia

Paulus Eko Kristianto &

paulusekokristianto12@gmail.com

Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

Pribadyo Prakosa

pribadyo25@gmail.com

Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya

Abstrak

Artikel ini membahas pelacakan sejarah gerakan ekumenis di Indonesia. Proses ini dilakukan menggunakan penelitian pustaka. Dalam penyajiannya, penulis memperhatikan periodisasi yang ada agar pembaca memperoleh gambaran sejarah yang utuh. Dari keseluruhan proses yang ada, uraian sejarah ini mengajak kita perlu memahami gerakan ekumenis tidak sebatas kesatuan teologi, melainkan memperjuangkan aksi bersama bagi terwujudnya perdamaian dan keadilan.

Kata Kunci: *sejarah, gereja, ekumenis, Indonesia, periodisasi*

Abstract

This article discusses the history of ecumenical movements in Indonesia. This process is carried out using library research. In its presentation, the writer pay attention to the periodization that exists in order to obtain that obtained from a complete description. From the whole existing process, we need to discuss this historical description of the ecumenical movement not limited to theological relations, but rather to fight for joint action for peace and prosperity.

Keywords: *history, church, ecumenical, Indonesia, period.*

Pendahuluan

Artikel ini memaparkan gerakan ekumenis di Indonesia. Gerakan ini merupakan upaya yang dilakukan guna menegakkan kesatuan di antara orang Kristen dan gereja-gereja di Indonesia. Ketika memaparkan hal tersebut, uraian ini tentu tidak lepas

dari cakupan gerakan ekumenis dan periodisasi. Cakupan gerakan ekumenis berhubungan dengan gerakan ekumenis yang ada di dunia, semua gereja di Indonesia dengan latar belakang yang bermacam-macam, termasuk di dalamnya meliputi gereja yang berlatarbelakang reformasi dan yang bukan reformasi, latar belakang katolik dan protestan. Mengingat begitu luasnya bahasan gerakan ekumenis, penulis membatasinya pada paparan yang mencakup gerakan ekumenis di kalangan gereja-gereja protestan. Hal ini dapat dilihat dalam kurun waktu atau periodisasi gerakan ekumenis pada abad ke-17 dan ke-18 serta parohan pertama dan ke dua abad ke-19, parohan pertama dan ke dua abad ke-20. Namun, sebelum ada pembahasan sedikit terkait dengan peristiwa di Edinburgh.

Pada bagian selanjutnya, penulis memaparkan kendala dan tantangan yang dihadapi Dewan Gereja Indonesia (selanjutnya ditulis DGI) dalam mewujudkan keesaan gereja. Di bagian ini, kita dapat belajar dari sejarah untuk bersikap lebih baik ketika menghadapi kendala dan tantangan yang dihadapi di masa sekarang dan yang akan datang. Pada bagian akhir artikel ini, penulis menyertakan hal-hal apa saja yang sekiranya dapat kita petik manfaatnya dari proses gerakan ekumenis di Indonesia dengan merelevansikan dalam konteks kehidupan bergereja, bermasyarakat, dan bernegara.

Metode Penelitian

Artikel ini ditulis berdasarkan penelusuran pustaka terhadap buku dan jurnal berkenaan gerakan ekumenis di Indonesia. Penelusuran ini dilakukan

dengan memperhatikan runutan periodisasi yang ada. Pada akhirnya, penulis menyajikan dengan pendekatan deskripsi analisis. Penulis mendeskripsikan gerakan ekumenis kemudian menganalisisnya.

Pembahasan

Sebelum terlampau jauh, maka ada baiknya dijelaskan mengenai istilah ekumenis itu sendiri. Ekumenis merupakan istilah Yunani yang berarti dunia yang didiami. Istilah tersebut merupakan kata senyawa dari *oikos* yang berarti rumah, ruang, tempat, dunia dan *menein* yang berarti mendiami (Hartono, *Gerakan Ekumenis Di Indonesia 1*). Dalam perkembangan sejarah, istilah ini dimengerti sebagai gereja-gereja yang bersama-sama bergumul sampai mencapai keesaan Injil. Hal ini dilakukan melalui sikap, kegiatan, dan aktivitas yang membuktikan keesaan di dunia dan masa kini (Hartono, *Gerakan Ekumenis Di Indonesia 1*). Kata “ekumenis” juga diartikan sebagai rela untuk melampaui dan mengatasi batas-batas konfesi yang memisahkan orang-orang Kristen (Jonge xvi). Menurut penulis, pembahasan gerakan ekumenis di Indonesia merupakan bahasan yang perlu didalami. Hal ini dikarenakan mengingat tanda-tanda semakin kuatnya warna kesukuan dan warna teologi gereja saat ini yang seakan menjadi batas-batas konfesi yang memisahkan satu dengan yang lainnya. Berporos pada gagasan ini, penulis berharap kesadaran gereja sebagai tubuh Kristus yang saling melengkapi di dalam keberagaman semakin dikuatkan kembali.

I. Sejarah Gerakan Ekumenis

Pada bagian ini, kita akan melihat beberapa hal penting dalam perjalanan sejarah gerakan ekumenis.

1. Akar-Akar Gerakan Ekumenis pada Abad-Abad Lalu, sampai dengan Konferensi PI Sedunia di Edinburgh (1910)

Jika ditarik ke belakang, gerakan ekumenis dapat dilihat setelah pecahnya gereja Katolik Roma dan menghasilkan gereja Protestan. Mulai dari sinilah yaitu dari gereja-gereja Protestan dan yang disebut Injili mencoba menyatukan diri. Adanya kesatuan kritik terhadap Katolik Roma tampaknya tidak membuat kaum Injili ini bersatu. Walaupun kaum Injili berpisah dari Roma, mereka menyadari bahwa pasti ada satu warisan bersama. Warisan ini berupa warisan gereja kuno. Melalui hal ini, timbul kesadaran bahwa usaha-usaha untuk memulihkan perpecahan akibat reformasi harus berangkat dari warisan bersama itu. Ada dua

macam usaha yang digunakan dalam abad ke-17 dan 18. *Pertama*, mencari titik persatuan dalam warisan gereja kuno sampai abad lima. *Kedua*, merumuskan semacam daftar pasal-pasal iman yang dianggap sebagai dasar untuk iman Kristen dan harus diterima secara mutlak (Jonge 4–5).

Usaha pertama yang disebut di atas dinilai terlalu intelektualis untuk diterima secara umum di gereja-gereja, sedangkan usaha kedua waktunya belum matang. Gereja-gereja masih memegang teguh rumusan gerejawi masing-masing. Setelah peranan rumusan gerejawi memudar, mulailah terbuka jalan untuk mencari kesatuan antara orang Kristen dari berbagai gereja. Memasuki masa-masa pencerahan dan pietisme banyak pandangan yang menekankan bahwa iman bersifat personal. Iman Kristen berangkat dari hati pribadi, kesalehan pribadi, dan penghayatan iman secara pribadi. Pengakuan keanggotan dari gereja dianggap sebagai hal yang kesekian.

Pada abad ke-19, kita juga dapat melihat usaha-usaha yang mempersatukan orang-orang Kristen dari gereja-gereja yang berbeda. Secara garis besar, hal ini dapat diperhatikan pada empat pokok. *Pertama*, usaha mempersatukan orang Kristen melalui gereja-gereja yang memiliki kesamaan dasar teologis. Hal ini terkonfirmasi dari terbentuknya Lambeth Conferences (1867), Reformed and Presbyterian Alliance, Methodist Ecumenical Conference (1881), International Congregational Council (1891). *Kedua*, usaha mempersatukan orang Kristen Protestan dalam satu perhimpunan yaitu *Evangelical Alliance* pada tahun 1864 di London. Adanya perhimpunan ini berkat usulan dari Thomas Chalmers. *Evangelical Alliance* membuahkan dampak positif bagi sejarah ekumenis. Mereka mengadakan “minggu doa sedunia” yang bertujuan meningkatkan kesadaran kesatuan dan persaudaraan, pengadaan konferensi-konferensi dan penerbitan majalah ekumenis “*Evangelical Christendom*”. Yang menjadi masalah dalam perhimpunan ini ialah karena anggotanya tidak mewakili gereja apapun, mereka berangkat secara pribadi sehingga kepentingan pribadi dirasa kuat. Hal ini yang membuat *Evangelical Alliance* makin hari makin kehilangan maknanya khususnya ketika gereja-gereja mulai terlibat dalam gerakan ekumenis Dewan Gereja Dunia (DGD). *Ketiga*, usaha mempersatukan orang Kristen melalui “Gerakan-Gerakan Sukarela”, “*Voluntary Movements*” yang lahir akibat revivalisme. Hal ini terkonfirmasi dari adanya “*Young Men’s Christian Association*” (YMCA), “*Young Women’s Christian Association*” (YWCA), “*Student Christian Movement*”, “*Student Volunteer Movement*

for Foreign Mission yang didirikan oleh John Mott. Keempat. Beragam usaha dalam hal pekabaran Injil. Kerja sama ini dimulai dengan menerjemahkan Alkitab, misalnya “British and Foreign Bible Society pada 1804. Ada juga Lembaga Alkitab Belanda yang didirikan pada tahun 1814. “London Secretaries Association” didirikan pada tahun 1819 merupakan bentuk kerja sama dalam hal pekabaran Injil.

Usaha-usaha ini akhirnya sampai pada Konferensi Pekabaran Injil Sedunia di Edinburgh yang dipelopori oleh John Mott pada tahun 1910. Peserta konferensi ini adalah wakil-wakil dari organisasi pekabaran Injil dan Gereja Anglikan. Konferensi ini bertujuan membangun sebagai studi dan konsultasi untuk membahas persoalan yang ada pada saat mengabarkan Injil. Pokok-pokok yang dibahas di Edinburgh yaitu pekabaran Injil di seluruh dunia, gereja di lapangan pekabaran Injil, pendidikan dan pengkristenan, berita Kristen dan agama-agama bukan Kristen, persiapan para pekabar Injil, hubungan dengan “pangkal” di dalam negeri, hubungan dengan pemerintah, dan kerjasama dan keesaan (Jonge 10). Akhirnya dibentuk *Continuation Committee* yang diberi tugas meneliti kemungkinan-kemungkinan untuk membentuk suatu Panitia Pekabaran Injil Internasional. Konferensi di Edinburgh ini dapat dikatakan sebagai awal kelahiran gerakan ekumenis.

2. Akibat Edinburgh – International Missionary Council

Setelah konferensi di Edinburgh, gerakan ekumenis menunjukkan perkembangan yang baik. Pada tahun 1921 didirikan *International Missionary Council* (IMC) yang diketuai oleh John Mott. Anggota-anggota dewan bukanlah perorangan, melainkan organisasi-organisasi kerja sama di bidang pekabaran Injil yang mulai didirikan sejak Edinburgh. Dalam perkembangannya, IMC akhirnya bergabung dengan DGD karena dirasa tugas dan tujuan yang hampir sama.

3. Akibat Edinburgh – Gerakan Faith and Order

Konferensi Edinburgh turut melahirkan gerakan *Faith and Order* (FO). Tujuan gerakan ini adalah mencari jalan menuju keesaan gereja dalam arti mempersiapkan suasana bagi keesaan gereja yang nyata secara penuh. Gerakan yang dipelopori oleh H. Brent ini membahas iman dan tata gereja. Konferensi pertama FO diselenggarakan di Swiss. Hasil positif dari konferensi ini adalah para peserta menyadari tentang hakikat gereja sebagai lembaga yang mengabarkan Injil di dunia sebagaimana biasa dipahami sebagai hakikat misioner. Konferensi kedua FO diselenggarakan di

Edinburgh pada tahun 1937. Dalam konferensi ini, eklesiologi merupakan topik yang hangat dibicarakan. Mereka ingin memastikan dengan cara melihat ke belakang sampai kepada masalah eklesiologi. Muncul juga pembahasan mengenai tiga model keesaan. Model pertama adalah “*cooperative action*”, aksi bersama. Model kedua adalah “*mutual recognition and intercommunion*”, yaitu saling mengakui dan merayakan Perjamuan Kudus bersama. Model terakhir adalah “*corporate or organic union*”, yang dipahami sebagai keesaan di tengah perbedaan sebagai satu tubuh (Jonge 136).

II. Latar Belakang Gerakan Ekumenis di Indonesia dan Upaya Mewujudkan Ekumenis Pada Abad ke-17 dan ke-18

Berbicara mengenai latar belakang, tentu dibutuhkan batasan waktu yang diambil sebagai pokok pembicaraan. Batasan waktu yang kami pilih pada bagian ini adalah pada abad ke-17 dan ke-18. Walaupun pada bagian yang lain juga akan dipaparkan gerakan ekumenis pada parohan pertama dan ke dua abad ke-19 dan ke-20. Selama abad ke-17 dan ke-18, semua orang Kristen Protestan di wilayah Indonesia, dalam hal ini yang sekarang termasuk satu badan gereja yaitu gereja *Gereformeerd*, dipimpin oleh majelis jemaat Batavia dan berhubungan erat dengan pemerintahan VOC (End and Weitjens 381). Hal ini dapat dilihat bahwa hingga saat itu hanya ada satu gereja saja yaitu gereja Protestan. Dalam hal ini, gereja calvinis memonopoli gereja di seluruh wilayah Indonesia. Gereja yang lain, baik Roma Katolik maupun golongan gereja Protestan yang lain, tidak diizinkan oleh pemerintahan VOC. Sejak tahun 1741, kita hanya dapat menemukan jemaat Lutheran di Batavia (End and Weitjens 381). Ketika lembaga Pekabaran Injil masuk pada tahun 1815, tidak ada perubahan besar karena utusan-utusan NZG yang mula-mula dipekerjakan dalam gereja protestan yang ada (End and Weitjens 381). Sejak tahun 1835, karya RMG di Kalimantan menghasilkan jemaat-jemaat yang tidak termasuk dalam gereja protestan, begitu pula halnya usaha NZG di Jawa Timur. Melihat kondisi tersebut, pemerintah pada tahun 1854 memaksa jemaat Lutheran di Batavia masuk gereja protestan. Dapat dikatakan bahwa orang Kristen Protestan di Indonesia terbagi atas dua kelompok besar yaitu gereja Protestan dan gereja hasil karya lembaga Pekabaran Injil. Selama masa tersebut, upaya ekumenis yang dilakukan adalah meningkatkan kerja sama atau kesatuan antara gereja Protestan ataupun para anggotanya dan gereja-gereja zending atau antara sesama warga zending (End and

Weitjens 381).

III. Gerakan Ekumenis Pada Parohan Pertama Abad ke-19

Selama tahun 1795-1816 di Indonesia terjadi ketidakstabilan politik yang disebabkan pemindahan kekuasaan silih berganti atas Indonesia dari tangan para penjajah, yaitu dari kekuasaan VOC atau Belanda kepada Inggris dan kemudian dari Inggris kekuasaan atas Indonesia dikembalikan lagi kepada Belanda. Selama terjadi perubahan kekuasaan atas Indonesia, terjadi pula perubahan atas kehidupan keagamaan termasuk di dalamnya kehidupan gerejawi.

Telah disebutkan bahwa pada awal abad Sembilan belas itu, di Indonesia terjadi perubahan kehidupan gerejawi. Jika pada mulanya ketika VOC berkuasa, hanya *Gereja Gereformeerd* (Gereja Protestan) yang diizinkan ada di Indonesia, tetapi ketika kekuasaan dipindahkan pada Inggris, kehidupan gerejawi berkembang pesat. Gereja Katolik diizinkan masuk dan disetarakan pula dengan Gereja Protestan. Selain itu, berbagai aliran, termasuk Lutheran pun diizinkan ada di Indonesia. Bukan itu saja, mulai muncul pula kegiatan pekabaran Injil di Indonesia, diantaranya dilakukan oleh NZG. Lembaga-lembaga atau badan-badan pekabaran Injil dimaksud antara lain adalah BMS, LMS, NZG, ABCFM, ABMFS, BM, RMG (Hartono, *Gerakan Ekumenis Di Indonesia* 11).

1. Gereja Protestan (Am)

Ketika gereja-gereja maupun lembaga-lembaga Pekabaran Injil mulai banyak masuk Indonesia, mereka mulai mengembangkan kegiatan menurut kebijakan masing-masing. Hal ini dikhawatirkan membawa dampak negatif yang berkaitan dengan keraguan pada masyarakat jika masing-masing gereja maupun lembaga pekabaran Injil menggunakan caranya masing-masing untuk membuat penduduk Indonesia menjadi Kristen. Oleh karena itu, pemerintahan Hindia Belanda di bawah raja Willem I menghendaki didirikannya sebuah Gereja Persatuan. Akhirnya pada 1835, sesuai dengan ketetapan raja tersebut, lahirlah Gereja Protestan (Am) di Indonesia atau *De Protestanche Kerk in Nederlandsch-Indie* (Hartono, *Gerakan Ekumenis Di Indonesia* 12). Terbentuknya Gereja Persatuan (gereja Protestan) dapat dikatakan sebagai wujud gerakan ekumenis karena terbentuknya Gereja Protestan merupakan hasil dari upaya untuk mempersatukan gereja-gereja protestan, walaupun usaha tersebut belum merupakan hasil dari usaha keesaan yang murni yang muncul dari gereja-gereja sendiri.

2. Lembaga-lembaga Pekabaran Injil

Selain terbentuknya gereja protestan sebagai wujud ekumenis, dibentuk pula lembaga pekabaran injil. Lembaga tersebut merupakan wadah yang di dalamnya orang-orang kristen dari berbagai gereja, dari bermacam aliran gerejawi, terlibat dalam kehidupan dan pekerjaan bersama (Hartono, *Gerakan Ekumenis Di Indonesia* 14). Pembentukan lembaga ini dikatakan wujud dari ekumenis karena dalam lembaga ini di dalamnya terdapat persekutuan di antara orang kristen, dalam hal ini para pekabar injil, yang tidak membeda-bedakan paham yang di anut oleh masing-masing. Latar belakang terbentuknya lembaga ini adalah lembaga ini didirikan oleh orang-orang kristen yang tidak puas terhadap kehidupan gerejawi saat itu. Ketidakpuasan tersebut karena gereja dianggap tidak menyadari atau melakukan tugas pekabaran injilnya dan di sisi lain iman dan perbuatannya kurang bertolak dari pengakuan bahwa Yesus adalah juru selamat yang sempurna (Hartono, *Gerakan Ekumenis Di Indonesia* 14).

3. Lembaga-lembaga Alkitab

Selain pembentukan Gereja Protestan (Am) dan lembaga-lembaga Pekabaran Injil, terbentuk juga lembaga-lembaga Alkitab yang juga merupakan wujud dari gerakan ekumenis. Lembaga tersebut dapat dikatakan sebagai wujud dari gerakan ekumenis karena lembaga tersebut dibentuk oleh orang-orang kristen yang berasal dari berbagai latar belakang gerejawi, tetapi juga melayani badan-badan dan gereja-gereja di Indonesia yang berpegang pada denominasi yang berbeda pula. Lembaga-lembaga Alkitab yang melakukan kegiatan di Indonesia di antaranya adalah BFBS, BS dan NBG (Hartono, *Gerakan Ekumenis Di Indonesia* 15).

IV. Gerakan Ekumenis Pada Parohan Ke dua Abad ke-19

1. Lembaga Pekabaran Injil

Pada periode parohan ke dua abad ke-19, ada lembaga pekabaran injil yang bekerja di Indonesia, di antaranya NZV, NGZV, dan UZV. NZV (*Nederlandsche Zendingvereeniging*) didirikan pada 2 Desember 1858 di Rotterdam oleh J. VoorhoeveH. Czn. Korporasi pekabaran Injil ini mempunyai sikap antitesis terhadap NZG sejak semula (Hartono, *Perubahan-Perubahan Dalam Kebijaksanaan Pekabaran Injil Belanda Di Indonesia Pada Masa Sekitar Awal Abad Ke-20* 23). Pada tahun 1863 sudah mulai menyelenggarakan PI di

tengah penduduk Sunda dan Tionghoa di Jawa Barat, dan sejak 1915 di Sulawesi Tengah. UZV didirikan pada 13 April 1859 di Utrecht oleh L. Merens dan rekan-rekannya (Hartono, *Gerakan Ekumenis Di Indonesia* 23). Korporasi pekabaran injil yang mengacu kepada gereja dalam hal tertentu sehingga dapat disebut bersifat gerejawi dalam hal tertentu sehingga membedakannya dengan NZV itu dengan melakukan pekerjaannya di beberapa daerah di antaranya Irian, Halmahera, dan Buru.

Jika dilihat secara mendalam ternyata medan atau tempat pekabaran injil berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor pertama adalah kepadatan penduduk di suatu tempat artinya daerah-daerah yang tidak cukup penduduknya sering tidak diminati oleh lembaga-lembaga pekabaran injil untuk dijadikan medan pekabaran injilnya. Faktor ke dua adalah dekatnya daerah yang akan dijadikan medan pekabaran injil itu dengan pemerintahan Hindia Belanda, baik yang sifatnya di pusat maupun di daerah. Bagi lembaga pekabaran injil kedekatan daerahnya dengan pemerintah Hindia Belanda dapat menjamin dan memberi harapan bagi terciptanya ketenangan dan ketertiban. Kedua manfaat tersebut sangat dibutuhkan lembaga tersebut dalam menjalankan tugas pekabaran injilnya (Hartono, *Gerakan Ekumenis Di Indonesia* 19). Faktor ke tiga adalah belum masuknya Islam artinya dengan adanya lembaga Pekabaran Injil di daerah yang belum masuknya Islam di daerah tersebut dalam hal ini daerah tersebut masih memeluk agama suku maka ada asumsi bahwa penduduk yang beragama suku lebih mudah menerima injil walaupun juga mengingat adanya peraturan yang berlaku di masa itu dalam daerah tersebut. Melihat kondisi terpercarnya medan para lembaga Pekabaran Injil, ada beberapa kekurangan atau kelemahan yang terjadi yaitu kurangnya hubungan antara para Pekabar Injil dari berbagai lembaga tersebut. Selain itu juga banyak lembaga Pekabaran Injil yang mengalami kesulitan karena kekurangan tenaga.

2. Penerbitan *De Opwekker*

Melihat adanya banyak kekurangan dalam lembaga Pekabaran Injil seperti yang sudah diuraikan di atas, maka dilakukan beragam upaya sebagai wujud gerakan ekumenis yang salah satunya adalah penerbitan *de opwekker*. Sebagai latar belakang, *de opwekker* ("perangsang") dekat hubungannya dengan GIUZ. Jika dilihat secara historis, pada tahun 1815, beberapa orang Kristen anggota Gereja Protestan di Batavia membentuk perhimpunan Pekabaran Injil

di dalam dan luar yaitu GIUZ (*Genootschap van In-en Uitwendige Zending te Batavia*). Salah satu tokoh pendirinya yaitu I. Esser, yang dalam tahun 1860-an menjadi Residen Timor, Pendeta E.W. King yang telah mendirikan jemaat berkumpul di Gereja "Rehoboth" di Jatinegara dan Mr. F.L Anthing (End and Weitjens 23). GIUZ ini berjasa terutama dalam menampung dan membantu para utusan Heldring. Di kemudian hari, perhatiannya diarahkan hanya pada kalangan orang kristen (nama) saja (End and Weitjens 23). Pada tahun 1881, pengelolaannya diambil alih oleh perhimpunan yang baru dibentuk yaitu NIZB. NIZB merupakan wadah kerja sama para pekabar injil dari berbagai lembaga serta pendeta-pendeta bantu gereja Protestan. Dalam majalah tersebut dibicarakan hal-hal dan masalah yang sama-sama dihadapi lembaga-lembaga Pekabaran Injil, begitu pula diperkenalkan perkembangan yang berlangsung di salah satu daerah sehingga orang di daerah lain dapat mengetahuinya. *De Opwekker* memiliki peranan penting bagi para pekabar Injil. Sebab melalui majalah tersebut para pekabar Injil dapat bertukar pikiran dan pengalaman, kemudian karangan-karangan yang dimuatnya sangat merangsang orang Kristen di Indonesia untuk menggumulkan kemandirian dan keesaan Gereja di Indonesia (Hartono, *Gerakan Ekumenis Di Indonesia* 21).

3. Pendirian Seminari Depok

Seminari depok merupakan kegiatan yang di dalamnya dipupuk saling mengenal dan perasaan bersatu di kalangan orang Indonesia. Hal ini terjadi karena di seminari tersebut merupakan tempat pemuda-pemudi dari seluruh Indonesia dididik menjadi pembantu para zendeling (End and Weitjens 382). Seminari Depok atau Seminarie Schuurman didirikan oleh J.A. Schuurman Johz, seorang pendeta jemaat di Batavia, pada 21 Agustus 1878. Di seminari inilah mereka dididik dan dipersiapkan untuk mengabarkan Injil pada bangsanya sendiri, serta mereka banyak bergaul satu dengan yang lain sehingga semangat ekumenis tertanam dalam diri mereka (Hartono, *Gerakan Ekumenis Di Indonesia* 22). Selain itu, seminari ini yang menyajikan pendidikan guru selama dua tahun disusul dua tahun pendidikan penghantar jemaat berdiri di daerah dengan jumlah orang kristen Indonesia yang kecil sekali tetapi justru dimaksud untuk melayani daerah-daerah lain tempat zending baru saja mulai bekerja atau baru memperoleh hasil sedikit. Seminari tersebut telah berperan untuk memunculkan kesadaran ekumenis walaupun hanya sedikit. Kesadaran ekumenis yang hendak ditawarkan

seminari tersebut adalah seminari tersebut berhasil mencetak tenaga yang mampu mengabarkan injil di antara dan kepada bangsanya sendiri yang merupakan wujud kebutuhan orang kristen di Indonesia yang ditanggapi oleh J.A.Schuurman Johz yang merupakan pendeta jemaat di Batavia dan mampu bergaul dalam kehidupan yang berlatarbelakang perbedaan aliran gerejawi dan kesukuan. Tindakan ini dapat dikatakan memunculkan semangat ekumenis walaupun hanya sedikit karena masih berkuat pada bangsanya sendiri. Namun, hal positifnya yang perlu dihargai adalah seminari ini telah berhasil mencetak orang yang mampu bergaul dengan orang yang berlatarbelakang perbedaan aliran gereja. Namun, dengan berjalannya waktu seminari tersebut ditutup pada tahun 1926. Seminari tersebut ditutup karena berdirinya pendidikan khusus dalam hal ini sekolah guru seperti di Nias pada tahun 1901, 1902 di Kupang, 1906 di Yogyakarta, 1924 di Karuni (Sumba), 1930 di Rantepao (Tator), 1932 di Banjarmasin, 1940 di Pendolo (Poso), dan 1954 di Irian (End and Weitjens 370). Selain itu, alasan yang lebih utama mengenai ditutupnya seminari Depok adalah karena dibutuhkannya sekolah theologia yang lebih tinggi dimana kebutuhan tersebut di kemudian hari dijawab dengan berdirinya Hoogere Theologische School di Bogor pada tahun 1934 (Hartono, *Gerakan Ekumenis Di Indonesia* 23).

4. Pembentukan NIZB

NIZB (*Nederlandsch Indische Zendingsbond*) merupakan hasil dari konferensi para pekabar Injil di Seminari Depok pada tahun 1881. Lembaga pekabaran Injil ini merupakan wadah persatuan bagi para pekabar Injil di satu pihak dan wadah kerjasama di antara mereka di lain pihak. Namun sejak 1920 konferensi NIZB tidak hanya membahas masalah yang berkenaan dengan kehidupan gereja-gereja pribumi, terutama yang berhubungan dengan kemandirian dan keesaan mereka. Sehingga NIZB memiliki peran yang sangat penting dalam masa pekabaran Injil di Indonesia (Hartono, *Gerakan Ekumenis Di Indonesia* 24). NIZB mempunyai peranan yang cukup penting dalam gerakan ekumenis di Indonesia. Sumbangsih yang diberikan yaitu mengupayakan kemandirian gereja dan keesaan mereka

V. Gerakan Ekumenis Pada Parohan Pertama Abad ke Dua Puluh: Gerakan Ekumenis Pada Masa Pertumbuhan dan Perkembangan

Beberapa hal penting yang terjadi terkait dengan

gerakan ekumenis pada periode ini adalah terjadinya perubahan. Perubahan tersebut adalah dilibatkannya orang-orang kristen Indonesia sendiri. Secara garis besar, periode ini menunjukkan adanya gerakan ekumenis sejak pendirian ZC sampai dengan konferensi NIZB terakhir.

1. Pendirian ZC

ZC (*zendingsconsulaat*) merupakan salah satu upaya guna mengatasi permasalahan dari lembaga Pekabaran Injil yang bekerja di Indonesia yang membawa kerugian tertentu dalam pelaksanaannya Pekabaran Injil mereka sendiri dan kekristenan di Indonesia. Lembaga ini merupakan wadah atau badan yang mempunyai tugas untuk mengurus kepentingan Pekabaran Injil. Dalam hal ini, ia mengurus masalah-masalah yang muncul di medan Pekabaran Injil sebagai akibat timbulnya kesulitan-kesulitan tertentu dalam pelaksanaan Pekabaran Injil atau kesalahpahaman antara lembaga Pekabaran Injil satu sama lain dan dalam kaitannya dengan hubungan antara lembaga Pekabaran Injil dengan pemerintahan Hindia Belanda. ZC merupakan badan yang membawa dampak guna mendorong adanya gerakan ekumenis yang ada di Indonesia. Sumbangsih yang diberikan yaitu lembaga ini melicinkan koordinasi dan hubungan kekristenan di Indonesia. Selain itu, lembaga ini juga mendorong orang kristen dan gereja-gereja Indonesia menuju keesaan mereka. Hal yang paling penting yang perlu dihargai dalam rangka mendorong gerakan ekumenis yaitu mempersiapkan pembentukan Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI). Hal ini dilakukan pada sebelum pembubarannya pada tahun 1953.

2. Pembentukan Perkumpulan-perkumpulan Kristen

Salah satu hal yang mengembirakan dengan dibentuknya beberapa perkumpulan kristen yang dapat dikatakan sebagai wujud dari gerakan ekumenis. Perkumpulan tersebut berasal dari luar dan dalam negeri. Perkumpulan tersebut di antaranya *Christen Studenten Vereniging* dan *Christen Jonge Vrouwen Federatie*.

a. Christen Studenten Vereniging (CSV)

CSV dikatakan sebagai perkumpulan yang mendorong gerakan ekumenis karena terpujuk semangat ekumenis di antara pemuda, mahasiswa dan pelajar kristen. Dalam perkumpulan tersebut, mereka saling bergaul, memahami, dan hidup bersama selaku persekutuan dalam Kristus (Hartono, *Gerakan Ekumenis Di Indonesia* 30). Hal

yang tak kalah penting adalah peranan dari Dr. John R. Mott selaku orang yang mewakili badan *World Student Christian Federation* (WSCF) yang semangatnya tertampung dalam semboyannya yang berbunyi “Ut Omnes Unum Sint” dalam Yoh. 17:21 guna memupukkan semangat ekumenis, khususnya bagi para pemuda.

b. Christian Jonge Vrouwen Federatie

Organisasi ini merupakan perkumpulan wanita kristen didirikan pada tahun 1928/ 1929 atas prakarsa *Nederlandse Christen Jonge Vrouwen Federatie*. Organisasi ini berpusat di Clubhuis. Hal yang menarik dari organisasi ini dalam hubungannya dengan gerakan ekumenis yaitu memupuk semangat ekumenis para anggotanya, dalam hal ini para wanita kristen dengan mempersatukan wanita kristen yang berasal dari berbagai latar belakang daerah, suku, dan gereja yang dapat dilihat tidak hanya di daerah Jawa saja melainkan juga di daerah luar Jawa. Perkumpulan ini bertujuan untuk memupuk semangat ekumenis kaum perempuan yang berasal dari berbagai macam daerah. Mereka hendak memajukan posisi perempuan yang berasal dari daerah terpencil dan berpendidikan lemah. Kelompok ini memperoleh perhatian dari Ny. T.S.G. Mulia dan Nn. A.L. Franz. Mereka berusaha menghidupkan kelompok ini karena mulai lemah setelah Perang Dunia II. Namun, usaha gigih mereka tetap membakar semangat ekumenis di sisi kaum feminis ini.

c. Pendirian Bond Kristen Tionghoa

Pada tanggal 23-27 November 1926, diadakan sebuah konferensi untuk menyepakati adanya suatu wadah untuk orang Kristen Tionghoa dan jemaat-jemaat kristen Tionghoa khususnya di Cipaku. Kemudian, wadah ini disebut *Bond van Chinese Christenen in Indonesie* (BCCI) atau Bond Kristen Tionghoa di Indonesia (Hartono, *Gerakan Ekumenis Di Indonesia* 36). Pergerakan nasional ini tidak dapat dilepaskan dari pergerakan di Tiongkok dan nasionalisme Tiongkok di *National Christian Council in China* pada tahun 1922. Tujuan badan ini yaitu membina anggota dan pengelolanya semakin memahai hakikat gereja dan kehidupan bergereja. Tujuan ini dimungkinkan memberikan dorongan pada orang Kristen Tionghoa untuk mandiri (Hartono, *Gerakan Ekumenis Di Indonesia* 33).

Pada tanggal 13-15 Juli 1934, *bond* ini mengadakan konferensi di Cirebon guna

mewujudkan usaha dalam melenyapkan kelemahan-kelemahan (masih kurang mengertinya tokoh *bond* terhadap makna gereja dan mengereja). Di dalam konferensi ini, dibentuk suatu wadah kelanjutan dari Bond Kristen Tionghoa sekaligus bentuk peningkatan semangat ekumenis yang diberi nama Geredja Serikat. Dalam kegiatannya, Geredja Serikat menyelenggarakan konferensi dan kegiatan untuk memberikan pemaknaan utuh bagi tokoh *bond* mengenai gereja seutuhnya. Gerakan ekumenis yang dilakukan wadah ini masih bersifat kesukuan, masih bersifat ketionghoan, dan belum bersifat ke-Indonesia-an (Hartono, *Gerakan Ekumenis Di Indonesia* 35). Namun wadah ini belum sampai pada tahapan pemersatuan gereja-gereja Kristen Tionghoa di Indonesia. Sekurangnya, kita sudah melihat suatu bentuk semangat dan gerakan menuju arah keesaan, ekumenis. Gerakan ini tidak dapat dipungkiri memberi dampak kepada gerakan keesaan di Indonesia. Geredja Serikat menghasilkan Dewan Geredja-geredja Kristen Tionghoa di Indonesia pada tahun 1948 hingga kemudian dibubarkan setelah dibentuknya DGI.

3. Peranan Konferensi IMC II dan III

Setelah IMC I (*International Missionary Council*) pada tahun 1921 di New York sekaligus pembentukannya, maka IMC II pun diadakan pada tahun 1928 di Yerusalem. Konferensi ini membahas masalah Kekristenan di Indonesia, terutama dalam pendewasaan jemaat di Indonesia. Selain itu, hadir pula tokoh pekabaran injil yang berpengaruh besar dalam Kekristenan di Indonesia, seperti T.S.G. Mulia. Kedatangan mereka memberikan sumbangan ide yang besar apabila kita lihat kaitannya dengan peningkatan kesadaran dan penghayatan ekumenis yang besar dalam diri orang Kristen. Kemudian, konferensi ini berlanjut ke IMC III dengan nilai yang sama menuju keesaan di Indonesia.

Konferensi IMC III diadakan di Tambaram India pada tahun 1938. Konferensi ini sungguh membawa angin segar dalam pergerakan ekumenis di Indonesia. Di konferensi ini, masalah-masalah yang diangkat sangat menarik, terutama dalam pergerakan di Indonesia. Topik-topik yang berkaitan pun dibahas diantaranya koordinasi dan persatuan pembentukan *World Council Churches* (WCC) atau Dewan gereja-gereja se-Dunia (DGD). Konferensi ini turut membawa bagi bangsa Indonesia.

Pengaruh pertamanya berdampak dalam pertemuan di Batavia. Pada tanggal 12 Januari 1939, beberapa tokoh gereja dan lembaga Pekabaran Injil membentuk

panitia persiapan Dewan Kristen Nasional. Setelah pertemuan itu, masih dilakukan pertemuan-pertemuan pada oktober 1939 dan 1941 guna membentuk anggaran dasar dan program-program dewan ini. Terlepas dari itu semua, laju pergerakan ekumenis semakin jelas dan pasti.

Di Solo, pada Oktober 1941, konferensi NIZB terakhir. Berbeda dengan pertemuan di Batavia, pertemuan ini diadakan guna melancarkan gerakan-gerakan ekumenis di Indonesia. Salah satu tokoh ekumenis, J. Leimena, menyampaikan aspirasinya mengenai kesatuan semua gereja menjadi satu atap gereja. Namun tidak selamanya, gerakan ekumenis mengalami kelancaran, Perang Dunia II membuat gerakan ini agak terhambat, terutama dalam hubungan internasional.

4. Peranan Nasionalisme

Pada bagian ini, gerakan nasionalis pemuda sangatlah berarti bagi terwujudnya keesaan gereja. Gerakan Pemuda yang sangat signifikan adalah bagaimana mereka menyatukan diri dalam semangat pemuda yang terlahir dan tertuang dalam sumpah pemuda. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905, membangkitkan semangat negara-negara di Asia untuk meraih mimpi kemerdekaan. Oleh karena itu, hal ini patut dimengerti bila di beberapa daerah (pada waktu yang sama) mulai melakukan pergerakan nasional dalam cakupan regional. Dalam jumlah yang besar, cakupan regional tersebut menetapkan "Sumpah Pemuda" pada 28 Oktober 1928. Sebenarnya, pergerakan nasional ini hanya secara implisit saja memberikan dorongan pada kalangan gerejawi untuk berdiri sendiri dan lepas dari perwalian asing (NIZB, IMC). Sumpah pemuda juga memberikan pengaruh yang besar kepada kalangan gerejawi untuk menerapkan persatuan dalam arti persatuan gerejawi (Hartono, *Gerakan Ekumenis Di Indonesia* 38).

5. Conferentie Tjieurop

Pada tahun 1922, perhimpunan mahasiswa Kristen di negeri Belanda (NCSV) mengutus Dr. C.L van Doorn selaku ahli pertanian melakukan pelayanan di antara pemuda dan mahasiswa Kristen (End and Weitjens 383). Menanggapi hal tersebut, maka ia membuka Clubhuis di Kebon Sirih dan pada tahun 1926 didirikannya perkumpulan mahasiswa kristen yang diberi nama *christen Studenten Vereniging op Java* (CSV op Java) berpusat di Clubhuis. Di perhimpunan tersebut, para mahasiswa dan pelajar Kristen saling bergaul, memahami, dan hidup bersama sebagai persekutuan dalam Kristus. Perkumpulan ini dapat

dikatakan mengandung unsur gerakan ekumenis karena konferensi yang dilakukan atas dorongan dan prakarsa dari tokoh ekumenis dan yang hadir adalah wakil dari perkumpulan mahasiswa kristen se dunia.

6. Mandiri Beberapa Gereja

Mulai tahun 1930, banyak gereja di Indonesia berkembang secara signifikan. Beberapa gereja di Indonesia sudah mampu melepaskan diri dari badan-badan diluar negeri. Sebenarnya, tujuan dari kemandirian gereja ini yaitu masing-masing gereja secara serempak mampu mencari kesatuan masing-masing dalam gereja itu sendiri maupun sinode. Namun, pengaruh dari luar juga masih terasa dalam langkah ekumenis di Indonesia, di sini lebih ditekankan kepada forum atau konferensi antar negara (Konferensi Edinburgh) dan bukan campur tangan langsung dari luar. Gereja-gereja itu sendiri terbagi dua kategori: gereja suku, yang di mana dalam gereja ini mengandung kesukuan yang kental (HKBP, GKJ, GKJW) dan gereja nasional yang terdapat di seluruh regional Indonesia (GPI). Sehubungan dengan itu, kemandirian gereja merupakan faktor penting bagi gerakan ekumenis di Indonesia, dalam arti bahwa gerakan ini sudah meluas dari perorangan (non- gerejawi) menuju gerejawi.

7. Pendirian HTS

HTS Didirikan di bogor pada tahun 1934 guna merealisasikan bentuk kerjasama gereja dengan badan pekabaran injil. Para pendiri HTS sendiri menginginkan agar orang-orang Kristen memiliki pandangan yang luas mengenai pekabaran Injil dan gereja di masa depan. T.S.G. Moelia, seorang tokoh ekumenis di Indonesia, sebagai salah satu pendiri juga berharap agar dengan pendidikan ini, akan ada sesuatu mediator yang mengerti dan mampu mewujudkan ekumene di Indonesia. HTS adalah alat akademik ekumenis pertama di Indonesia dan sebagai sumber pemikiran kreatif dan dinamis, karna tanpa perannya tidak bisa dibayangkan bagaimana gerakan ekumenis di Indonesia.

VI. Gerakan Ekumenis pada Masa Pengembangan

a. Gereja-Gereja Ditempa Untuk Mandiri

Pendudukan Jepang atas Indonesia memberikan dampak yang besar dalam dunia bergereja. Setelah Indonesia di jajah jepang, hubungan dengan badan pekabaran Injil di luar mengalami hambatan yaitu jepang menganggap pekabaran Injil yang di dalamnya terkandung

kebudayaan Belanda merupakan "musuh" bangsa Jepang. Hal ini yang membuat gereja-gereja di Indonesia harus mengawali langkah mandiri, baik secara struktur maupun finansial. Hal ini dimaksudkan agar gereja mampu mandiri menghadapi masalahnya masing-masing dalam tugas pelayanannya di dunia.

b. Gereja-Gereja Disadarkan Melihat Cakrawala Baru

Di bawah penjajahan Jepang, gereja mengalami penderitaan dan kesulitan. Beban bergereja mulai ditanggung masing-masing gereja tanpa bantuan dari luar. Gereja dipaksa mampu untuk berdiri. Kesulitan ini dirasakan oleh gereja-gereja pada saat itu. Hal ini yang justru membangkitkan rasa solidaritas antar gereja. Mereka mulai menyingkirkan perbedaan-perbedaan yang ada sambil tolong menolong memikul kesulitan ini. Melalui hal ini, gereja diajak untuk turut dalam pesta penderitaan bersama guna membagi kesukaran dan juga menyatukan kekuatan persaudaraan. Solidaritas di sini, tidak hanya dimaksud dalam kalangan gereja protestan namun juga menjangkau kepada gereja Katolik. Umat Kristen diajak melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih luas dan mampu menjangkau semuanya.

c. Gereja-Gereja Ditempa Untuk Hidup Dalam Kesatuan

Setelah menerima rasa solidaritas dan persaudaraan yang sama, gereja diajak untuk melihat bagaimana tindak lanjut dari rasa solidaritas tersebut. Gereja diajak untuk melakukan solidaritas secara kongkrit. Rupanya, semangat ini mendapat perhatian Jepang guna menyatukan gereja-gereja di Indonesia. Hal ini dikarenakan Jepang sudah memiliki Gereja Persatuan di sana dan mereka ingin mendorong orang Kristen di Indonesia untuk menyatukan diri. Dalam hal ini, persatuan gereja (Persatuan Keristen Celebes dan Panggabungan Gereja-gereja Masehi di Ambon Syu) dimaksudkan agar gereja mampu bertindak nyata dalam semangat persatuan.

VII. Gerakan Ekumenis pada Masa Pembuaahan Hasil

a. Pembentukan DPG

DPG didirikan dengan tujuan mengurus

kepentingan bersama gereja, hubungan antar gereja, dan jalan menuju ketercapaian tujuan tersebut. Dewan didirikan pada tahun 1946 merupakan salah satu dari beberapa dewan-dewan gereja. Dan oleh karenanya DPG mengambil bagian dalam pembentukan DGI.

b. Pembentukan MOBKG

Pada tanggal 17 Maret 1947 didirikan sebuah "Madjelis Oesaha Bersama-sama Geredja-Geredja Keristen (MOBGK). Badan ini didirikan sebagai bentuk respon terhadap konferensi gereja dan zending di Indonesia bagian timur (5-25 Maret 1947 di Malino) guna menjawab kebutuhan akan melangsungkan tugas persatuan. Tujuan dari MOBKG sendiri yaitu menyelidiki dan menganjurkan pembentukan kesatuan gereja di Indonesia. Di kemudian hari, diadakan rapat sidang raya lanjutan yang sejenis guna menuju kesatuan gereja, serta secara implisit mengandung unsur penyiapan DGI. Dalam perjalanannya, DGI melakukan banyak kegiatan yang mendukung pergerakan gereja-gereja di Indonesia. Namun pada tahun 1948 mereka mengalami kemunduran dikarenakan kesulitan dalam pembiayaan kepengurusannya. Walaupun begitu, dapat kita ambil kesimpulan bahwa MOBKG merupakan rangka dari terbentuknya DGI.

c. Pembentukan DGKTI

Setelah konferensi pada tanggal 25-28 Mei 1948, kaum tionghoa juga memajukan langkahnya untuk menghasilkan wadah seperti MOBKG. Mereka bersepakat untuk mendirikan dewan yang mewakili suara kaum tionghoa yaitu Dewan Geredja-geredja Kristen Tionghoa. Tujuan dewan tersebut yaitu mempercepat persatuan Kristen Tionghoa dan membangun hubungan dengan gereja lain guna memperluas pekabaran injil. Pada tahun 1950, mereka berhasil mencapai satu bentuk satu sinode. Dalam kiprahnya, DGKTI terlibat dalam pergerakan ekumenis di Indonesia melalui hubungan dengan gereja-gereja lain. DGKTI berusaha menentukan sikap terhadap DGI. Walaupun awalnya kelompok tionghoa menjadikan wadah ini khusus Tionghoa, kemudian hari ternyata lebih berorientasi pada keesaan gereja.

d. Pembentukan "Madjelis Keristen" di Medan

Pada tahun 1949 di Medan, telah dibentuk sebuah badan keesaan "Majelis Kristen" di Medan atau "Madjelis Keristen" di Sumatra guna

mempercepat langkah keesaan gereja di daerah ini. Badan ini berperan sejalan dengan DPG di Yogyakarta maupun MOBKG di Makassar. Keempat badan ini berperan aktif dalam persiapan DGI sendiri. Walaupun Madjelis Keristen memiliki dampak yang tidak sebesar DPG dan MOBKG, namun peran nasionalis kedaerahannya sudah baik dan kita harus memperlakukan nilai pada konteksnya (retributif).

e. Menuju Pembentukan DGI

MOBKG merupakan perintis pembentukan DGI, hal ini bertolak dari perubahan politik pada waktu itu. Dalam hal ini, GPI mendukung penuh pembentukan dewan gereja tersebut, yang berarti GPI harus menguburkan ambisinya untuk menjadi wadah bagi kesatuan untuk orang Kristen Protestan di Indonesia termasuk orang Kristen anak buah zending. Namun, karena adanya pergolakan politis dalam negeri menyebabkan pembentukan DGI tertunda. Akhirnya, DGI didirikan tepat pada saat hari raya Pentakosta 25 Mei 1950 oleh konferensi GPI. Konferensi tersebut menyatakan bahwa DGI sebagai tempat permusyawaratan dan usaha bersama gereja-gereja di Indonesia menuju keesaan. DGI dianggap unik di antara dewan-dewan pada negara-negara lain karena adanya tujuan yang jelas dan tegas.

VIII. Gerakan Ekumenis pada Parohan Ke dua Abad Ke-20

1. Gerakan Ekumenis Indonesia dari 1950 – 1980-an

Gerakan ekumenis pada paruh kedua yang dimulai dari tahun 1951 dapat digambarkan sebagai "Gereja yang Bertumbuh". Bertumbuh dalam kaitannya dengan kehidupan intern gereja-gereja itu masing-masing dan sekaligus dalam hubungannya dengan kehidupan ekumenis di Indonesia (Hartono, *Gerakan Ekumenis Di Indonesia* 76).

Gerakan ekumene paruh kedua abad ke-20 diawali dengan konferensi pembentukan DGI pada Mei 1950 dan tepat pada hari Pentakosta, 25 Mei 1950, DGI dinyatakan berdiri (End and Weitjens 381). Keanggotaannya berdasarkan syarat-syarat yang disepakati dalam Sidang DGI. Di dalam DGI terdapat pengurus Harian (BPH/MPH) dan Majelis Pekerja Lengkap (BPL/MPL). Hingga tahun 1994, DGI telah melakukan dua belas kali sidang raya. Sidang Raya DGI pertama di Jakarta 21-28 Mei 1950 dan

pada 21-30 Oktober 1994 di Jayapura. Perubahan Nama DGI menjadi PGI diputuskan di Ambon pada sidang Raya ke-X, 21-31 Oktober 1984.

2. Sidang Raya DGI

SR I DGI

SR I DGI diselenggarakan di STT Jakarta pada 21-28 Mei 1950. Guna melengkapi pendirian DGI, dibentuklah beberapa badan pembantu DGI. Tentu, hal ini juga tidak luput dari perhatian terhadap masalah gereja dan negara di samping DGI dengan lembaga Pekabaran Injil. Setelah SR I DGI, DGI turut serta membantu penyelesaian masalah hubungan antara GKST dan NHK dalam suatu pertemuan di Poso.

SR II DGI

SR II diselenggarakan pada tanggal 20-30 Juni 1953 bertempat di GPIB Paulus Jakarta. Perhatian sidang terarah pada persoalan-persoalan yang menyangkut upaya untuk menuju kesatuan gereja Kristen di Indonesia; tanggung jawab gereja terhadap masyarakatnya di lapangan politik dan kenegaraan, lapangan sosial dan ekonomi dan lain-lainnya; pergumulan dan tantangan gereja-gereja dalam menjalankan kesaksiannya dalam hubungannya dengan neoanimisme, sinkretisme, komunisme, sekularisme. Setelah SR II, ada perselisihan di antara gereja yang berlatar belakang kesukuan di antaranya seperti HKBP dan HKI, serta GKJTS dan GKJTU. DGI juga ikut serta dalam beberapa pertemuan ekumenis antara lain dalam SR II DGI di Evanston.

SR III DGI

SR III berlangsung pada tanggal 8-17 Juli 1956 bertempat di STT Jakarta. SR III berharap proses cita-cita pembentukan satu gereja Kristen yang esa itu dapat dipercepat. Hal ini dikarenakan keesaan dalam Kristus itu dapat dihayati dengan baik. Di samping itu, SR III mengharapkan kehidupan bernegara benar turut dalam kesatuan keselarasan dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

SR IV DGI

SR IV diselenggarakan di Jakarta (di aula SMAK PSKD) pada tanggal 3-13 Juli 1960. Gereja-gereja di Indonesia lebih menggumuli mengenai keesaan mereka, terutama dalam kaitannya dengan telah terjadinya perpecahan di beberapa gereja dan akan terjadinya hal yang sama. Di pihak lain, gereja

juga ikut menggumuli perkembangan politik yang berlaku di sekitar tahun itu.

SR V DGI

SR V ini merupakan sidang yang istimewa karena untuk pertama kalinya mendapat perhatian pemerintah. Sidang dilangsungkan di Ganefo Conference Hall, Senayan, Jakarta pada tanggal 3-14 Mei 1964. Ada beberapa hal yang dibicarakan antara lain persoalan keesaan dan gagasan mengenai terbentuknya sinode oikumene, pekabaran Injil, pembangunan jemaat, gereja dan masyarakat dan pelayanan. Sidang ini juga melakukan perubahan AD dan ART DGI dalam arti perubahan beberapa pasal. DGI banyak melakukan hubungan dalam hal misi perdamaian dengan beberapa negara.

SR VI DGI

SR VI kali ini diadakan di Makasar di kompleks STT pada tanggal 29 Oktober – 8 November 1967. Sidang mempermasalahkan beberapa pokok persoalan, antara lain adalah keesaan gereja. DGI juga terlibat dalam Musyawarah Antar Agama.

SR VII DGI

SR VII berlangsung di Universitas HKBP Nommensen, Pematang Siantar pada 18-28 April 1971. Gereja menyadari bahwa tugasnya di dunia ialah menegakkan keselamatan yaitu melakukan pembaharuan kemanusiaan, menegakkan keadilan di tengah masyarakat, menegakkan keselamatan secara utuh, rohani dan jasmani, pribadi dan persekutuan.

SR VIII DGI

SR VIII berlangsung di Universitas Kristen Satya Wacana tanggal 1-12 Juli 1976. SR ini membicarakan haluan umum bagi kegiatan-kegiatan di bidang keesaan dan kesaksian dalam rangka pembentukan Gereja kristen yang Esa di Indonesia, khususnya kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan oleh gereja-gereja anggota; pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan oleh BPH DGI; penyiapan usul-usul mengenai pembaharuan struktur, nama dan sarana-sarana lain DGI untuk diputuskan dalam SR IX yang akan datang.

SR IX DGI

SR IX berlangsung di Tomohon pada tanggal 19-31 Juli 1980. Sidang ini membahas masalah yang berkaitan dengan tantangan dan

kemungkinan dalam hidup manusia, masyarakat, bangsa, negara, dan gereja. PGI selaku badan persekutuan berfungsi sebagai salah satu badan yang menghubungkan Gereja-Gereja di Indonesia dengan gereja Kristen di luar negeri. Selain itu, PGI juga berfungsi sebagai perwakilan gereja-gereja terhadap pemerintah pusat. Van den End menambahkan, masalah besar PGI yaitu pemikiran yang masuk dalam PGI dipengaruhi oleh pemikiran Barat, khususnya berkenaan masyarakat modern, masyarakat industri dan dipengaruhi oleh sekularisasi, persaingan ekonomi. Memang keadaan tersebut dapat dijumpai dalam masyarakat perkotaan di Indonesia. Namun, masyarakat di mana gereja tumbuh didominasi oleh masyarakat agraris dan tradisi suku masih kuat. Dalam keadaan ini, timbullah jarak antara PGI dan gereja lokal. Padahal, Gereja-gereja tidak berbeda-beda dalam tradisi iman. Hal ini menunjukkan bahwa unsur kesukuan merupakan salah satu penghalang (End and Weitjens 389-91).

PGI juga memiliki badan-badan kerjasama lain sebagai berikut:

- Persekutuan-persekutuan Gereja Indonesia Wilayah (PGIW) didirikan pada 1964 dengan tujuan menggalakkan gerakan menuju ke keesaan di tingkat lokal.
- Lembaga Alkitab Indonesia (LAI) didirikan pada 1954 dan bertugas menyiarkan Alkitab dalam bahasa Indonesia dan berbagai bahasa Nusantara lainnya.
- Badan penerbit Kristen Sutan Gunung Mulia (BPK-GM) didirikan pada 1950.
- Majelis Pusat Pendidikan Kristen (MPPK) bertugas mengkoordinasikan sekolah-sekolah kristen di Indonesia.

Dalam perkembangannya, PGI bukanlah satu-satunya organisasi gereja yang ada di Indonesia. Gereja-gereja karya zending Jerman dan Belanda telah tergabung dalam PGI. Pada abad ke-20, denominasi-denominasi dari Negara-negara berbahasa Inggris memasuki Indonesia. Denominasi tersebut antara lain Metodis, Baptis, Adventis, Pentakosta, CAMA, Gerakan Kharismatis, dan lembaga inter-denominasi seperti Overseas Missionary fellowship (OMF).

IX. Tantangan Gerakan Ekumenis di Indonesia

1. Masuknya pekabar Injil dari denominasi Amerika.

Sekitar abad ke-20, banyak para pekabab Injil yang masuk ke Indonesia dari denominasi Amerika. Perbedaan tradisi antara denominasi dari Amerika dan dari Eropa merupakan tantangan tersendiri bagi gerakan ekumenis di Indonesia. Karena baik gereja zending maupun Gereja Protestan Indonesia (GPI) dilatarbelakangi oleh tradisi yang dibawa dari Belanda, baik secara langsung maupun tidak, dipengaruhi pula oleh tradisi dari Eropa. Perbedaan ini menjadi tantangan tersendiri hingga gerakan ekumenis di Indonesia.

2. Pecahnya perang Pasifik.

Perang Pasifik pecah antara tahun 1937 hingga 1945 di wilayah Asia Pasifik. Ketika perang Pasifik pecah, kekuasaan atas Indonesia berada di tangan pemerintahan Jepang. Oleh karena itu, keadaan di Indonesia cukup kacau balau di segala aspek, baik pemerintahannya termasuk juga gereja-gereja di Indonesia. Sehingga rencana pembentukan Dewan Gereja-gereja dan badan-badan zending yang telah direncanakan oleh Dewan Kristen Nasional menjadi terhambat (End and Weitjens 384).

3. Kurangnya rasa persatuan dalam negeri.

Secara eksplisit, pokok ini menunjukkan masyarakat Indonesia, terkhusus bagi masyarakat Kristennya, memiliki rasa persatuan yang masih tipis. Hal ini terbukti ketika Dewan Pekabaran Injil se-Dunia (IMC) mendorong dibentuknya Dewan pekabaran Injil Nasional. Sayangnya, Gereja *Gereformeerd* tidak bersedia mengikutinya sehingga yang terbentuk hanyalah Dewan Gereja Wilayah. Hal itu pun tidak pada Indonesia seluruhnya, melainkan hanya Indonesia Tengah dengan pusatnya di Makassar (End and Weitjens 383).

4. Adanya perang kemerdekaan.

Ketika pada akhirnya Dewan Gereja Indonesia (DGI) dirintis oleh MOBGK tahun 1948, keadaan di Indonesia sedang tidak aman. Indonesia pada tahun-tahun setelah diproklamasikan kemerdekaannya masih terus berjuang dalam perang kemerdekaan melawan sekutu, terutama dalam memperjuangkan kedaulatan Indonesia atas seluruh wilayah tanah air Indonesia (End and Weitjens 386). Kondisi yang tidak kondusif ini menjadi penghambat bagi gerakan ekumenis di Indonesia.

X. Tinjauan Kritis terhadap Sikap Gerakan Ekumenis

Tujuan gerakan ekumenis adalah mewujudkan keesaan gereja. Namun, pertanyaannya, keesaan gereja yang seperti apa yang ingin diwujudkan? Apakah dengan bersatunya gereja-gereja menjadi gereja yang esa (satu) atau keesaan yang bersifat rohani? Keesaan yang didasarkan pada kesatuan iman terhadap Yesus Kristus? Tampaknya pertanyaan semacam ini menjadi pergumulan gerakan ekumenis.

Menjawab pertanyaan dan pergumulan semacam ini, diadakan konferensi-konferensi yang membahas mengenai ekumenis seperti apa yang ingin diwujudkan. Pertemuan semacam ini tidak hanya diikuti oleh Gereja Protestan, tapi juga Gereja Ortodoks yang merespon lebih positif dari Gereja Katolik Roma (awalnya tidak ikut serta kemudian terlibat walaupun pada akhirnya tidak ada hasil). Hal ini merupakan langkah yang baik dalam mewujudkan usaha menuju keesaan dengan memulai keterbukaan.

Kita menemukan adanya pergeseran-pergeseran pandangan. Pertama, pergeseran dari keseragaman ke arah keanekaragaman. Kedua, pergeseran dari segi institusional kepada segi pelayanan. Melalui pergeseran ini, akhirnya diusahakan apa yang disebut dengan persekutuan. Lembaga ekumenis memang sudah seharusnya tidak bertujuan membentuk gereja yang esa, tetapi mewujudkannya dalam bentuk persekutuan yang menghargai keanekaragaman, terlebih dalam konteks bangsa Indonesia yang plural dan memiliki keanekaragaman denominasi.

Keanekaragaman lembaga-lembaga Injil dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negatif apabila usaha pekabaran Injil dilakukan menurut kebijakan masing-masing (Hartono, *Gerakan Ekumenis Di Indonesia* 12). Di satu sisi, keesaan gereja diakui sebagai usaha yang baik dalam mewartakan gereja-gereja dari berbagai denominasi untuk bersatu. Namun, di sisi lain keesaan gereja ini juga dapat memunculkan masalah baru. Keesaan gereja di sini bukan bermaksud untuk menyamakan semua gereja menjadi satu model, bentuk yang sama. Justru, keesaan ini seharusnya dimaknai sebagai lembaga yang dapat mewartakan gereja-gereja untuk bersatu dengan tetap menerima perbedaan di antara masing-masing. Berkaitan dengan keanekaragaman lembaga Injil, tidak dapat dipaksakan untuk mereka menyamakan cara dalam mengabarkan Injil, karena mereka juga berangkat dari pemahaman dalam aliran mereka. Mungkin, lebih baik jika tidak berusaha menggeneralisasikan gereja-gereja tersebut, namun mengusahakan dialog di antara gereja-gereja dalam rangka mengusahakan pekabaran Injil yang lebih baik dan sesuai dengan konteks di mana mereka berkarya.

Seperti telah dikatakan di atas, bahwa keesaan gereja terkadang malah membawa kepada masalah baru. Masalah besar yang dihadapi PGI adalah masuknya pemikiran yang berbau masyarakat modern atau pemikiran barat. Adanya pengaruh dari modernitas, sekularisasi dan persaingan ekonomi (End and Weitjens 389–91). Hal seperti ini dapat dijumpai pada masyarakat perkotaan. Namun permasalahannya adalah pemikiran seperti itu bertolak belakang dengan keadaan anggota PGI yang didominasi oleh masyarakat agraris dan tradisi yang masih kuat. Keadaan seperti ini menimbulkan jarak antara PGI dan gereja lokal sehingga tujuan daripada PGI untuk menyatukan justru membuat jarak tersendiri. Ada kesan bahwa unsur kesukuan merupakan salah satu penghalang. Mungkin benar bahwa ada pengaruh unsur kesukuan, namun jangan sampai terjebak dalam pemahaman bahwa faktor ini yang menghambat. Dari PGI sendiri perlu dievaluasi sejauh mana pemikiran barat yang dipengaruhi modernitas dan sekularisasi itu berdampak pada kinerja PGI. Penulis berpikir bahwa PGI perlu mengerti kapasitas tiap anggotanya. Keadaan yang belum dan sudah modern tidak dapat dihindari. PGI diharapkan mampu menyikapi hal ini dengan cara yang berbeda karena ada dua konteks yang berbeda. Dalam menanggapi persoalan di perkotaan dan masyarakat agraris, kita perlu memiliki pendekatan yang berbeda. Walaupun tak dapat dipungkiri, nantinya menjadi dilema bagi PGI sendiri.

Penutup

Ada beberapa hal yang sekiranya dapat kita tarik sebagai relevansi terhadap gerakan ekumenis yang telah dilakukan dahulu bagi kehidupan bergereja saat ini. Dengan melihat latar belakang berdirinya DGI sebagai wadah gerakan ekumenis gereja, kita dapat mengetahui bahwa kesulitan dan kesengsaraan yang dialami bersama oleh gereja-gereja juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesadaran untuk mewujudkan keesaan gereja yang bersama-sama menderita. Kemandirian yang terlalu dini bagi gereja-gereja dan pulihnya hubungan antara gereja-gereja dengan lembaga pekabaran injil maupun organisasi asing juga menyadarkan pentingnya gerakan yang mengarah pada keesaan gereja. Sebab pada masa yang bersamaan, rasa nasionalisme kebangsaan juga semakin tumbuh semenjak kemerdekaan bangsa dan persatuan bangsa. Dengan begitu, kesadaran akan persatuan antara dewan-dewan antara gereja-gereja di daerah yang sudah terbentuk juga semakin kuat. Di samping itu, berdirinya Dewan Gereja se-dunia membuat kesadaran pentingnya gerakan ekumenis

di tanah air. Keadaan yang banyak berubah pada masa kemerdekaan, khususnya dalam hal tuntutan yang semakin maju di bidang politik, sosial, maupun ekonomi kiranya menjadi dorongan tersendiri bagi gereja-gereja untuk mewujudkan suatu gerakan yang mengarah pada keesaan gereja sebagai tubuh Kristus yang saling melengkapi.

DGI sebagai hasil dan alat gerakan ekumenis perlu dilihat sebagai wadah bersama gereja-gereja untuk bermusyawarah dan kerjasama dalam menghadapi krisis, dan perlu dirasakan dan bermanfaat besar bagi kehidupan bergereja itu sendiri, hingga selanjutnya bagi kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, kendala-kendala masih kuatnya identitas kesukuan yang diidentikkan dengan gereja itu sendiri hendaknya memperoleh perhatian yang lebih serius demi mewujudkan kesatuan gereja dalam tubuh Kristus itu. Gerakan ekumenis yang telah dilaksanakan diharapkan membawa sumbangsih yang positif dan menjadi inspirasi yang melebihi batas-batas konfesional yang menjadi pemisah antara umat Kristus satu dengan yang lainnya.

Kearifan dan budaya setempat memang identitas dan kekayaan tiap-tiap anggota di dalamnya, tetapi tidak lantas hal ini menjadi pembeda yang tajam antara yang satu dan lainnya. Namun di masa sekarang, kiranya kesadaran untuk bersikap terbuka terhadap identitas diri maupun yang lain juga dikembangkan untuk mau berkontak dan belajar dari yang lain, untuk selanjutnya mewujudkan kerja sama dalam menghadapi berbagai persoalan pelik seperti perijinan mendirikan rumah ibadah, pelayanan sosial, maupun persoalan yang lain. Usaha untuk membentuk identitas yang terbuka tidak berarti mengaburkan identitas masing-masing (Singgih 16). Keesaan dapat terwujud apabila ada suatu sikap yang terbuka satu sama lain, di samping kesamaan 'nasib' dalam menghadapi segala persoalan yang ada.

Kepekaan gereja terhadap masalah-masalah politik-ekonomi-sosial yang terjadi di mana ia tinggal di bumi, *e pi ges ouk tou kosmou* (di bumi tetapi tidak berasal dari dunia), ini juga semakin mantap jika dihadapi dan dipikirkan bersama dalam suatu gerakan ekumenis. Sementara di sisi lain, hubungan dengan pemerintah dapat dijalin secara baik melalui gerakan ekumenis ini (End and Weitjens 390). Dengan demikian, sesuai dengan makna dari ekumenis sebagai tempat tinggal bersama yang rela untuk melampaui dan mengatasi batas-batas konfesional yang memisahkan orang-orang kristen, juga hendak menumbuhkan semangat ekumenis pada denominasi lain maupun pada saudara kita dari gereja katolik. Yang selanjutnya mengarah

juga pada keterbukaan terhadap pluralisme agama yang menjadi ciri khas di negara kita ini. ■

Daftar Pustaka

- End, Th. van den, and J. Weitjens. *Ragi Carita 2: Sejarah Gereja Di Indonesia 1860-an - Sekarang*. BPK Gunung Mulia, 2007.
- Hartono, Chris. *Gerakan Ekumenis Di Indonesia*. Pusat Penelitian dan Inovasi Pendidikan Duta Wacana, 1984.
- ---. *Perubahan-Perubahan Dalam Kebijakan Pelaksanaan Pekabaran Injil Belanda Di Indonesia Pada Masa Sekitar Awal Abad Ke-20*. Duta Wacana Christian University Press, 2006.
- Jonge, Christian de. *Menuju Keesaan Gereja: Sejarah, Dokumen-Dokumen Dan Tema-Tema Gerakan Ekumenis*. BPK Gunung Mulia, 1990.
- Singgih, Emanuel Gerrit. "Katolik Dan Protestan Sekarang Ini (II): Suatu Refleksi Pribadi." *Tempat Dan Arah Gerakan Ekumenis*, edited by J.B. Banawiratma, BPK Gunung Mulia, 1994.